

Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) Untuk Mendukung Kesejahteraan Penyandang Disabilitas di Provinsi Jawa Timur

Nurkholis¹⁾, Sapto Pramono²⁾, Ika Devy Pramudiana³⁾

^{1) 2) 3)} Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: m.nurkholis1979@gmail.com

ABSTRAK

Dalam rangka meningkatkan penanganan kesejahteraan sosial masyarakat Jawa Timur melalui kebijakan pemerintah yang telah dibuat dengan tujuan untuk membantu masalah sosial, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) bagi penyandang Disabilitas Berat. Tujuan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melalui menginisiasi program ASPD untuk melakukan upaya pemenuhan hak kesejahteraan penyandang disabilitas melalui pemberian bantuan sosial non tunai dalam jangka waktu tertentu untuk penyandang disabilitas berat di luar panti untuk pemenuhan kebutuhan penunjang dalam meningkatkan kapabilitas dan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari masyarakat. Program ASPD diselenggarakan dengan melibatkan berbagai pihak, diantaranya pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah kabupaten atau kota. Dalam hal ini dinas atau instansi sosial, Bank Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (BPD Jatim) dan pilar-pilar sosial dalam hal ini adalah pendamping disabilitas. Sinergitas kebijakan yang telah dicetuskan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang dalam mengentaskan permasalahan sosial khususnya penanganan penyandang disabilitas membutuhkan penanganan tepat sasaran menjadi kunci penanganan permasalahan sosial khususnya bagi penyandang disabilitas agar dapat melakukan pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan baik dan diterima dengan baik di lingkungan tempat tinggalnya.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Disabilitas, Kesejahteraan Sosial, Rehabilitasi Sosial

Abstract

In order to improve the handling of the social welfare of the people of East Java through government policies that have been created with the aim of helping with social problems, the East Java Provincial Social Service is organizing a Social Assistance for Persons with Disabilities (ASPD) program for people with Severe Disabilities. The aim of the East Java Provincial Social Service is by initiating the ASPD program to make efforts to fulfill the welfare rights of persons with disabilities by providing non-cash social assistance within a certain period of time for persons with severe disabilities outside the orphanage to fulfill their support needs in increasing capability and social responsibility as part of society. The ASPD program is carried out involving various parties, including the East Java Provincial government and district or city governments. In this case the social service or agency, the Regional Government Bank in this case is the East Java Regional Development Bank (BPD Jatim) and the social pillars in this case are disability companions. The synergy of policies that have been initiated by the East Java Provincial Social Service, which in alleviating social problems, especially handling people with disabilities, requires appropriate treatment, which is the key to handling social problems, especially for people with disabilities, so that they can fulfill their daily needs well and be well received in the environment where they live.

Keywords: Public Policy, Disability, Social Welfare, Social Rehabilitation

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami modernisasi, hal ini ditandai dengan kemajuan penanganan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dibuat dengan tujuan untuk membantu masalah sosial yang ada di dalam lingkup negara. Perkembangan penanganan kesejahteraan sosial merupakan usaha yang terencana dan terarah yang meliputi berbagai bentuk intervensi dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah, dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial.

Berdasarkan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial khususnya penyandang disabilitas di Indonesia juga telah diatur Undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur telah mendukung penanganan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas demi terciptanya kesejahteraan sosial secara adil dengan menciptakan program kerja Gubernur Jawa Timur “*Nawa Bhakti Satya*” yang salah satu bhaktinya menyebutkan untuk “Jawa Timur Sejahtera” khususnya bagi penyandang disabilitas. hal tersebut tertuang dalam Sesuai dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melalui menginisiasi program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) untuk melakukan upaya pemenuhan hak kesejahteraan penyandang disabilitas melalui pemberian bantuan sosial non tunai dalam jangka waktu tertentu untuk penyandang disabilitas berat di luar panti untuk pemenuhan kebutuhan penunjang dalam meningkatkan kapabilitas dan tanggung jawab sosial. penyandang disabilitas berat yang sudah tidak dapat direhabilitasi lagi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri merupakan tanggungjawab pemerintah, yang berarti bahwa penyandang disabilitas berat

di Provinsi Jawa Timur merupakan tanggung jawab pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Program ASPD diselenggarakan dengan melibatkan berbagai pihak, diantaranya pemerintah provinsi, Pemerintah kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur, Bank Pemerintah Daerah, dan pilar-pilar sosial sebagai pendamping disabilitas Provinsi Jawa Timur. Sinergitas kebijakan yang telah dicetuskan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang sudah mencoba mengentaskan permasalahan sosial khususnya penanganan penyandang disabilitas. Permasalahan sosial yang cukup beragam dan membutuhkan penanganan tepat sasaran menjadi kunci penanganan permasalahan sosial khususnya bagi penyandang disabilitas agar dapat melakukan pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan baik dan diterima dengan baik di lingkungan tempat tinggalnya.

Rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi kebijakan program bantuan sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur untuk mendukung kesejahteraan penyandang disabilitas pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melalui Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas?. Serta apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) untuk mendukung kesejahteraan penyandang disabilitas pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melalui Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas?

B. LANDASAN TEORITIS

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomas Dye yaitu apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*Public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Definisi kebijakan publik menurut Thomas Dye yang dikutip oleh Subarsono (2012:2) mengandung makna bahwa:

- a) Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta.

- b) Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Menurut Charles Lindblom (1986) dalam Winarno (2007: 32) mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji oleh aktor pembuat kebijakan. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap yaitu tahap penyusunan agenda kebijakan, tahap formulasi kebijakan, tahap adopsi kebijakan, tahap implementasi kebijakan, dan tahap evaluasi kebijakan.

3. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan proses atau tahapan yang penting dalam sebuah siklus kebijakan. Bagaimanapun, sebuah kebijakan yang telah dihasilkan apabila tidak dilaksanakan maka akan sia-sia atau tidak dapat mengatasi suatu permasalahan. Anderson (1979) mengatakan bahwa implementasi kebijakan atau program merupakan bagian dari *administrative process* (proses administrasi). Proses administrasi sebagaimana yang dikatakan oleh Anderson, digunakan untuk menunjukkan desain atau pelaksanaan sistem administrasi yang terjadi pada setiap saat.

4. Model Implementasi Kebijakan

Model teori Edwards III (1980:10) yang mengemukakan "*In our approach to the study of policy implementation, we begin in the abstract and ask: What are the preconditions for successful policy implementation?*" yang artinya (Dalam pendekatan kami untuk studi implementasi kebijakan, kami mulai secara abstrak dan bertanya: Apa prasyarat untuk implementasi kebijakan yang sukses?).

Untuk menjawab pertanyaan penting itu Edwards III (1980: 10) menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam implementasi kebijakan publik, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi.

C. METODE

1. Jenis Penelitian

Sebagai sebuah karya tulis ilmiah, penelitian harus menggunakan metode tertentu yang akan menjadi acuan dalam melakukan semua proses penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hal ini sesuai dengan pendapat Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:11), yang menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, lisan atau tulisan dan orang-orang yang berperilaku yang dapat diamati. Dari kalimat yang diuraikan diatas penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menggunakan fakta apa adanya tentang suatu objek, gejala, keadaan, dengan menggambarkan, menguraikan, menginterpretasikan dan diambil suatu kesimpulan dalam bentuk tulisan yang sistematis.

Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena penelitian ini mengungkapkan apa yang terjadi di lapangan, data yang disimpulkan berupa kata-kata atau gambar bukan angka-angka. Selain itu penelitian ini lebih menekankan pada proses dan hasil tanpa bermaksud untuk menguji hipotesis, dan penelitian sendiri atau dengan bantuan orang lain dapat menjadi alat pengumpul utama. Dengan demikian, dalam penelitian yang menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif ini ingin mendeskripsikan segala fenomena dan menganalisis implementasi kebijakan program ASPD dalam mendukung kesejahteraan penyandang disabilitas di Jawa

Timur yang kemudian akan disajikan dalam bentuk tulisan secara sistematis.

2. Fokus Penelitian

Ada dua maksud tertentu yang ingin peneliti capai dalam merumuskan masalah penelitian dengan memanfaatkan fokus. Pertama, menetapkan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria *inklusi-eksklusi* atau kinerja masuk keluar suatu informasi yang masuk di lapangan (Moleong 2007:94).

Fokus dalam penelitian ini adalah: (1) Implementasi kebijakan Program ASPD dalam mendukung kesejahteraan penyandang disabilitas pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melalui Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas, serta (2) Faktor penghambat dan pendukung implementasi program ASPD dalam mendukung kesejahteraan penyandang disabilitas pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melalui Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi dimana peneliti akan melakukan penelitian untuk mengungkap keadaan yang sebenarnya dari objek penelitian dan memperoleh data atau informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Peneliti memilih Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebagai objek penelitian karena Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur telah menerapkan pelayanan dan pemenuhan kesejahteraan sosial khususnya bagi penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur juga di kawasan tengah kota yang aksesnya juga mudah untuk dilewati selain itu Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur juga memiliki *progress* yang lebih cepat daripada daerah lainnya dalam lingkup penanganan dan pemenuhan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Implementasi Komunikasi Tentang Awal Munculnya Kebijakan Program Bantuan Sosial Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Sesuai dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas pokok membantu Gubernur menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang sosial serta tugas pembantuan. Lebih spesifik, disebutkan pada Bagian ke-3 pasal 8 ayat 3 Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebagai pelaksana kebijakan secara teknis diantaranya tentang penanganan penyandang Disabilitas membentuk Bidang Rehabilitasi Sosial pada Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas yang menangani terkait penyandang disabilitas untuk menjalankan tugas dan wewenang yang telah dirumuskan sebelumnya.

Dalam rangka proses rehabilitasi sosial, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melakukan upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui pemberian program ASPD kepada penyandang disabilitas secara non tunai dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi hak dan terapi untuk meningkatkan kapabilitas dan tanggung jawab sosial penyandang disabilitas berat sebagai bagian dari masyarakat.

Pemberian bantuan bertujuan memperhatikan prinsip rehabilitasi sosial dalam upaya mengintegrasikan penyandang disabilitas ke dalam keluarga dan masyarakat, mengembangkan lingkungan yang mendukung bagi penyandang disabilitas dengan memperkuat fungsi keluarga, serta memaksimalkan potensi dan kekuatan setiap orang dalam menciptakan sinergitas dalam upaya rehabilitasi sosial berbasis masyarakat.

2. Implementasi Sumber Daya Tentang Aktor yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Aktor yang terlibat dalam diselenggarakannya program ASPD melibatkan berbagai pihak, diantaranya:

- a) Dinas atau Instansi Sosial Kabupaten atau Kota adalah dinas atau instansi yang menangani bidang sosial bertempat di 38 kabupaten atau kota di wilayah Provinsi Jawa Timur.
- b) Pendamping penyandang disabilitas, adalah seseorang yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan tugas pendataan, pendampingan hingga pencairan Program ASPD pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Pendamping Penyandang disabilitas di Jawa Timur saat ini telah terbentuk sejumlah 180 orang yang menyebar di wilayah kabupaten atau kota di Jawa Timur.
- c) Penyandang disabilitas dan/atau keluarga atau wali, penyandang disabilitas sendiri adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
- d) Bank penyalur adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jatim yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Jawa Timur. Bertanggungjawab terhadap penyaluran dana ASPD dari awal sampai akhir diterima oleh penerima manfaat.

3. Implementasi Disposisi Bentuk dan Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

a) Kriteria

- (1) Berusia enam bulan sampai dengan < 60 tahun.
- (2) Tidak dapat dan atau kesulitan melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari dan atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain.
- (3) Disabilitas tidak mampu menghidupi diri sendiri.
- (4) Mengalami kesulitan mengakses layanan publik dan berakibat tidak terpenuhinya hak hidup penyandang disabilitas.

b) Persyaratan

- (1) Terdaftar sebagai penduduk Jawa Timur, yang dibuktikan dengan identitas kewarganegaraan (KK, KTP atau Surat Keterangan Domisili).
- (2) Terdaftar pada aplikasi E-Disabilitas Provinsi Jawa Timur.
- (3) Telah dilakukan asesmen oleh Pendamping Sosial Penyandang Disabilitas dan di verifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten atau Kota.
- (4) Penyandang Disabilitas klien non panti atau lembaga atau yayasan.
- (5) Penyandang Disabilitas bukan penerima bansos Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Asistensi Penyandang Disabilitas (ASPD) Kementerian Sosial RI.

c) Jumlah Bantuan

Besarnya bantuan adalah Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) per orang per bulan selama 12 (dua belas) bulan, dan diberikan empat kali dalam satu tahun yaitu setiap triwulan sekali.

- e) Tahapan Penyaluran Bantuan Sosial pada Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD)

Tahapan penyaluran bantuan sosial ASPD dimulai dengan tahap awal yaitu:

- (1) Tahap pendataan
- (2) Penetapan penerima bantuan sosial
- (3) Penyaluran bantuan sosial
- (4) Pemanfaatan bantuan sosial
- (5) Pemberhentian bantuan sosial
- (6) Tahap monitoring dan evaluasi program bantuan sosial.

4. Implementasi Struktur Organisasi Tentang Kesiapan Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Kesiapan sumber daya aparatur Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melalui Program ASPD telah disiapkan dengan matang. Sadar bahwa keberadaan instansi tidak bisa bekerja sendiri untuk penanganan penyandang disabilitas, sehingga kesinergian antar lini dikerahkan demi tercapainya penanganan yang optimal. Persiapan dimulai ketika teretusnya program ASPD ditunjuk oleh Gubernur Jawa Timur sebagai salah satu program prioritas Jawa Timur sehingga saran dari beliau untuk bersinergi dengan elemen lain lebih kuat. Pada akhirnya, program dimaksud diselenggarakan dengan melibatkan berbagai pihak, diantaranya pemerintah provinsi sebagai pemrakarsa yang memastikan programnya berjalan dengan lancar dan sesuai aturan yang berlaku.

Pemerintah kabupaten atau kota dalam hal ini dinas atau instansi sosial yang mengusulkan hingga mengawal bantuan sampai pada penyandang disabilitas. Bank Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (BPD Jatim) sebagai bank pencair dana bantuan sosial baik di pusat maupun di kabupaten atau kota dan pilar-pilar sosial dalam hal ini

adalah pendamping disabilitas bentukan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 180 orang.

5. Implementasi Tentang Respon Masyarakat Khususnya Penyandang Disabilitas Terhadap Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Selama Pelaksanaan Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Sejauh peneliti melaksanakan penelitian respon penyandang disabilitas yang masuk dalam program ASPD di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur perlu adanya informasi yang mendukung program tersebut. Peran informasi dianggap penting karena dapat secara menyeluruh mengetahui program besutan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang diberikan kepada masyarakat khususnya penyandang disabilitas. Bagi masyarakat pada umumnya dapat dengan mudah mencari informasi dengan membaca koran, atau artikel di internet seputar perkembangan program pemerintahan.

Namun, bagi penyandang disabilitas tentu mempunyai cara tersendiri agar mendapatkan informasi yang serupa dengan masyarakat umum. Tidak semua penyandang disabilitas mampu menyerap informasi dengan baik, oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui respon mereka terhadap program-program pemerintahan yang berfokus pada pelayanan bagi penyandang disabilitas. Respon positif pelaksanaan program ASPD pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur telah diutarakan oleh narasumber yang telah diwawancarai peneliti sebanyak 5 (lima) orang penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan program ASPD Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut dilakukan peneliti untuk menghimpun informasi yang valid dan faktual bagi penerima program dimaksud, peneliti memilih Kabupaten Malang di Kecamatan Lawang dan Singosari.

6. Faktor Pendukung Implementasi Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) Dalam Mendukung Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Melalui Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Tahap implementasi program terdapat dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukung yang muncul dalam pelaksanaan program ASPD pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur:

- a) Terpelihara kondisi kesehatan penyandang disabilitas (tidak terdampak kondisi disabilitasnya atau tidak memiliki penyakit lain). Terpelihara kondisi kesehatan penyandang disabilitas secara istilah adalah kegiatan menjaga kesehatan menyeluruh penyandang disabilitas karena kondisi sakit atau cedera yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan fungsional dan kualitas hidup secara maksimal. Program ASPD dapat mendukung diantaranya dengan menggunakan terapi fisik, fisioterapis, okupasi terapis dan rehabilitasi medik serta kebutuhan penunjang kesehatan lainnya.
- b) Penyandang disabilitas memiliki perilaku yang adaptif dan berada dalam lingkungan yang aman (tidak dipasung, dikucilkan, atau diasingkan oleh keluarga). Program bantuan sosial ASPD mencoba untuk meminimalkan stigma diskriminasi dan penolakan terhadap penyandang disabilitas. Oleh karenanya, menjadi penting bahwa pemahaman semua ragam disabilitas harus dapat diakomodasi termasuk penyandang disabilitas berat. Semua pihak harus bisa menyadari keberadaan penyandang disabilitas yang secara fisik terlihat ataupun tidak.
- c) Penyandang disabilitas berada dalam pengasuhan dan perawatan yang tepat dimana keluarga memberikan dukungan instrumental (tenaga dan materi),

dukungan informasional (bimbingan dan edukasi), dukungan kasih sayang dan dukungan sosial untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Pentingnya peran lingkungan sangat besar dalam menumbuhkan kesehatan mental para penyandang disabilitas. Lingkungan sekitar yang baik dapat menjadi faktor penentu keberhasilan dalam pertumbuhan kesehatan mental, karena dapat memfasilitasi penyandang disabilitas untuk berbaur dan bermasyarakat.

7. Faktor Penghambat Implementasi Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) Dalam Mendukung Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Melalui Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Tahap implementasi program terdapat dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor penghambat yang muncul dalam pelaksanaan program ASPD pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur:

- a) Pengetahuan masyarakat tentang penyandang disabilitas yang masih perlu luruskan dan dirasakan sebagai “aib” sehingga keberadaannya disembunyikan. Penyandang disabilitas yang memiliki masalah kesejahteraan sosial perlu mendapat perhatian agar mereka dapat melaksanakan perannya sebagaimana masyarakat semestinya. Penyandang Disabilitas adalah mereka yang tubuhnya berkebutuhan khusus sehingga menghambat kemampuannya untuk melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat.
- b) Pengenalan atau sosialisasi program ASPD belum diketahui oleh masyarakat secara menyeluruh. Pengenalan program sebenarnya sudah mulai dengan bersinergi dengan pendamping disabilitas sebagai potensi sumber dan dinas sosial kabupaten atau kota sebagai ujung

tombak Dinas Sosial Provinsi. Namun memang keterbatasan sumber daya aparatur di tiap kabupaten atau kota perlu adanya penyatuan visi dan misi untuk tercapainya tujuan pemenuhan kebutuhan penunjang bagi penyandang disabilitas.

- c) Pengetahuan tentang teknologi informasi pilar-pilar sosial sebagai pendamping disabilitas masih perlu ditingkatkan. Pilar-pilar sosial dalam hal ini masih perlu peningkatan berbasis teknologi. Penggunaan aplikasi dan penginputan data pada Aplikasi E-Disabilitas dilakukan pada sistem android atau web yang nantinya akan mempermudah aktor yang terlibat untuk melihat hingga menghimpun data disabilitas. Disadari bahwa, pilar-pilar sosial yang direkrut merupakan generasi lama yang beberapa dari mereka masih tidak paham dengan teknologi android. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah Dinas Sosial Provinsi Jawa timur untuk selalu berinovasi agar terciptanya sinergi yang baik dengan tujuan meringankan beban penyandang disabilitas.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa, dalam rangka proses rehabilitasi sosial, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melakukan upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui pemberian program ASPD kepada penyandang disabilitas secara non tunai dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi hak dan terapi untuk meningkatkan kapabilitas dan tanggung jawab sosial penyandang disabilitas berat sebagai bagian dari masyarakat.

Pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui pemberian program ASPD kepada penyandang disabilitas secara non

tunai dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi hak dan terapi untuk meningkatkan kapabilitas dan tanggung jawab sosial penyandang disabilitas berat sebagai bagian dari masyarakat. Program tersebut setelah dikoordinasikan oleh Gubernur Jawa Timur, dan masuk dalam program utama “Nawa Bhakti Satya” yang salah satu bhaktinya menyebutkan untuk “Jawa Timur Sejahtera” khususnya bagi penyandang disabilitas berat dengan hasil program ASPD menjadi program prioritas Gubernur Jawa Timur.

Hasil penelitian ini merujuk pada teori Edwards III (1980:10) yang menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam implementasi kebijakan publik, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi yang disimpulkan bahwa:

a) Komunikasi

Munculnya kebijakan program ASPD pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu tanggung jawab dalam mendukung kesejahteraan penyandang disabilitas berat di Jawa Timur.

b) Sumber Daya

Aktor yang terlibat dalam pelaksanaan Program ASPD pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur bersinergi dengan pendamping disabilitas sebagai pilar-pilar sosial, Dinas Sosial Kabupaten atau Kota sebagai verifikator awal, dan Bank Jatim sebagai penyalur bantuan sosial ASPD ke Kabupaten atau Kota.

c) Disposisi

Bentuk dan pelaksanaan program ASPD pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur adalah adanya proses pendataan calon penerima bantuan sosial, penetapan penerima bantuan sosial oleh Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur, pencairan dana bantuan sosial, hingga monitoring dan evaluasi setelah bantuan itu diterima oleh penyandang disabilitas berat.

d) Struktur Organisasi

Kesiapan Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan Program ASPD pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur telah bersinergi dengan semua lini, diantaranya adalah Dinas Sosial Kabupaten atau Kota, pendamping disabilitas bentukan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan Bank Jatim.

e) Implementasi

Respon masyarakat khususnya penyandang disabilitas terhadap Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur selama pelaksanaan Program ASPD cukup baik diterima oleh masyarakat khususnya penyandang disabilitas. Hasil wawancara oleh 5 (lima) orang responden berharap bantuan ini dapat berlanjut kedepannya dikarenakan bantuan ini mendukung kesejahteraan penyandang disabilitas baik dari sisi rehabilitasi keluarga dan sisi kebutuhan penunjang

juga diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan data serta diharapkan dapat menunjang wawancara dengan sumber yang kompeten dan lebih banyak dalam kajian pendaftaran tanah sistematis lengkap.

REFERENSI

- Anderson, J. (1979). *Public Policy Making*, (Second ed.). New York: Holt.
- Dye, T. R. (1992). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Englewood Cliffs
- Edwards, & George, C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Inc.
- Subarsono. (2012). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Med Press (Anggota IKAPI).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

2. Rekomendasi

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Peneliti selanjutnya

